

***LEGAL STANDING PEMOHON PADA PENGUJIAN FORMIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG BUMN
DALAMPERSPEKTIF *FIQH AL-QADĀ'IYYAH* AL-MAWARDI
(STUDI PUTUSAN MK NO. 52/PUU-XXIII/2025)***

SKRIPSI

Oleh:

Erij Karimah

NIM. 05020422033



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erij Karimah
NIM : 05010421003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Legal Standing Pemohon Pada Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Bumh Dalam Perspektif *Fiqh Al-Qadā'iyah* Al-Mawardi (Studi Putusan MK No. 52/PUU-XXIII/2025)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 28 Februari 2025

Yang



Erij Karimah

NIM. 05020422033

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erij Karimah

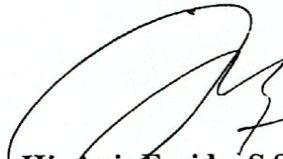
NIM : 05020422033

Judul : Legal Standing Pemohon Pada Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Bumn Dalam Perspektif Fiqh Al-Qadā'iyah Al-Mawardi (Studi Putusan Mk No. 52/Puu-Xxiii/2025)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 27 November 2025

Pembimbing,



Dr. Hj. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si.

NIP. 197208062014112001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Erij karimah

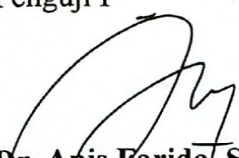
NIM. : 05020422033

Judul : *Legal Standing Pemohon Pada Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Bumn Dalam Perspektif Fiqh Al-Qaḍā'iyah Al-Mawardi (Studi Putusan MK NO. 52/PUU-XXIII/2025)*

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 18 Desember 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

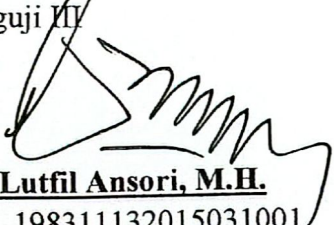
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I


Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H., M.Si

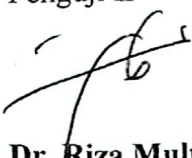
NIP. 197208062014112001

Penguji III


Dr. Lutfil Ansori, M.H.

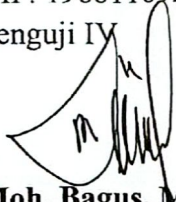
NIP. 198311132015031001

Penguji II


Dr. Riza Multazam Luthfy, M.H.

NIP. 198611092019031008

Penguji IV


Moh. Bagus, M.H.

NIP. 199511032022031001

Surabaya, 20 Januari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Dr. H. Sunyati Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 193271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Erij karimah
NIM : 05020422033
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : erjkarimah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Legal Standing Pemohon Pada Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025
Tentang Bumn Dalam perspektif Fiqh Al-Qaḍā'iyah Al-Mawardi (Studi Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 52/PUU-XXIII/2025)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 Januari 2026

Penulis


(Erij Karimah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Legal Standing Pemohon Pada Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 Tentang BUMN Dalam Perspektif *Fiqh Al-Qadā'iyah* Al-Mawardi (Studi Putusan Mk No. 52/PUU-XXIII/2025)” merupakan hasil dari jawaban 2 rumusan masalah. Pertama, Bagaimana legal standing dalam putusan MK No. 52/PUU-XXIII/2025 pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025? 2. serta yang kedua, Bagaimana analisis *Fiqh al-Qadā'iyah* terhadap legal standing pada putusan MK No. 52/PUU-XXIII/2025?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual, serta untuk menerapkan hukum tersebut, perlu adanya sumber hukum. Sumber primer yang digunakan dalam menganalisis peneliti ini. Diantaranya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perubahan kedua atas undang undang Nomor 12 Tahun 2011, Putusan Mahkamah Konstitusi MK No. 52/PUU-XXIII/2025 tentang pengujian Undang undang nomor 1 tahun 2025 tentang BUMN, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi perubahan ke-3 atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 yang menjadi yurisprudensi pengertian *legal standing* dalam pengujian formil.

Hasil penelitian ini menunjukkan, *legal standing* dalam penerapan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-XXIII/2025 merupakan tindakan yang tidak tepat. Sebab, para hakim tidak menimbang makna *legal standing* dengan yurisprudensi sebelumnya. Serta hasil penelitian dengan pendekatan *Fiqh Al-Qadā'iyah* Al-Mawardi menunjukkan, *legal standing* yang dipermasalahkan oleh diperbolehkan dalam *Fiqh Al-Qadā'iyah*, yang dalam artian seorang yang mengadu adalah masyarakat yang merasa dirinya terdzalimi, dengan maksud perkaranya merupakan perkara yang dialaminya sendiri, maka tidak bisa diwakilkan dengan orang lain.

Penelitian menunjukan belum adanya konsistensi dalam putusan MK mengenai *legal standing* dalam pengujian undang-undang secara formil. Oleh karena itu, diharapkan agar MK dapat menyusun parameter *legal standing* dengan menyusun parameter *legal standing* dengan menyebutkannya dalam peraturan hukum acara MK yang lebih terukur dan eksplisit untuk mengurangi inkonsistensi dalam menafsirkan *legal standing* pada pengujian fomil. Serta diharapkan untuk para pembentuk undang-undang, untuk mematuhi prosedur yang telah di sepakati bersama agar mengurangi membuka ruang sengketa konstitusional.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian.....	14
F. Peneliti Terdahulu	15
G. Landasan Teori.....	20
H. Definisi Operasional	25
I. Metode Penelitian.....	27
J. Sistematika Pembahasan.....	31
BAB II TINJAUAN UMUM PENGUJIAN FORMIL DAN FIQH AL-	
QADĀ' IYYAH AL-MĀWARDĪ	33
A. Teori Kerugian Konstitusional (<i>constitutional injury</i>).....	33

B. Teori <i>Taxpayer</i>	37
C. Pengujian formil.....	40
D. <i>Fiqh Al-Qadā' iyyah</i> Al-Māwardī	52
BAB III LEGAL STANDING DALAM PUTUSAN MAHKAMAH	
KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XXIII/2025	61
A. Deskripsi kasus	61
B. Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 52/PUU-XXIII/2025.....	66
C. Tabel pemetaan fakta dasar putusan	74
BAB IV ANALISIS PENGUJIAN FORMIL DAN FIQH AL-QADĀ' IYYAH	
AL-MĀWARDĪ TERHADAP LEGAL STANDING PADA PUTUSAN	
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 52/PUU-XXIII/2025.....	76
A. Analisis pertimbangan hakim tantang <i>legal standing</i> dalam pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025	76
B. Analisis <i>legal standing</i> pada Prinsip <i>Wilāyah Al-Qadā'</i> Dalam Perspektif Al-Māwardī	85
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
BIOGRAFI PENULIS	92

DAFTAR TRANSLITERASI

1. Konsonan

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ahmad, and Novendri M. Nggilu. "Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2019): 785–808. <https://doi.org/10.31078/jk1646>.
- Akmal, Diya Ul, and Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi." *Mulawarman Law Review* 7, no. 1 (June 2022): 49–70. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v7i1.780>.
- al-Māwardī. *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah li al-Māwardī*. 1st ed. Mesir: Darel hadith, 2006.
- "Arti Kata Fikih - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed November 14, 2025. <https://kbbi.web.id/fikih>.
- Asral Wadi and Mulyanto Abdullah Khayr. "Studi Pemikiran Pendidikan Islam Imam Al-Mawardi." *Nian Tana Sikka : Jurnal ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (July 2024): 153–76. <https://doi.org/10.59603/niantanasikka.v2i4.465>.
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum acara pengujian Undang-Undang*. Indonesia. Mahkamah Konstitusi, 2006. Jakarta.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Konstitusi Press, 2006. Jakarta.
[//perpustakaan.hukumunkris.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D193](http://perpustakaan.hukumunkris.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D193).
- Bisariyadi. "Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (March 2017): 22–44. <https://doi.org/10.31078/jk1412>.
- Bukhari, Muhammad ibn Isma'il al-. *Shahih Al-Bukhari*. Riyadh: Darussalam, 1997.
- Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta Timur: Sinar grafika, 2021.
- Firdaus, Ilmi. "Implikasi Putusan MK No. 73/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian Pasal 222 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Terhadap Hak Partai Politik Dan Warga Negara Dalam Pemilu Perspektif Fiqh Siyasa." In -. Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Hafsah. *Pembelajaran Fiqh*. Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2013.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum Dr.Harjono, S.H., M.C.L.* 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.

- Imaniah, Bahjatul. "Kajian Historis Tentang Legal Standing Dissenting Opinion Dalam Praktik Peradilan Di Mahkamah Konstitusi." Undergraduate, UIN KHAS JEMBER, 2025. <https://digilib.uinkhas.ac.id/47427/>.
- Ismantara, Stefany. "Citizen Lawsuit: Pelindung Hak Konstitusional Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Journal Equitable* 8, no. 2 (June 2023): 294–310. <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i2.4984>.
- Kholidah, Yunita Nur. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XX/2022 Tentang Pengujian UU Nomor 3 Tahun 2022." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023. https://doi.org/10.2/Yunita%252520Nur%252520Kholidah_C94219114.pdf.
- Kurniawan, Akbar. "Analisis Hukum Pemenuhan Legal Standing Sebagai Syarat Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang (Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023)." Undergraduate, Universitas Hasanuddin, 2024.
- Marzuki, Mohamad Laica. "Pemohon Harus Dapat Mendalilkan 'Legal Standing'-Nya ..." *Berita Mahkamah Konstitusi*, March 2004.
- MUHAMMAD, NDARU. "Analisis Legal Standing Pemohon Tentang Syarat Calon Presiden Dan Wakil Presiden Perspektif Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023)." Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib (2025).
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Pub. L. No. Nomor 08/PMK/2006 (2006). https://www.mkri.id/public/content/pmk/PMK_PMK8.pdf.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pub. L. No. Nomor 2 Tahun 2021, Nomor 2 Tahun 2021 (2021).
- Pragata, Rakha Adi. "Tinjauan Yuridis Legal Standing Pemohon Dalam Uu No. 8 Tahun 2011: Studi Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.
- Purnomo, Wahyu Budi Setio. "Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Legal Standing Putusan Tidak Dapat Diterima Dalam Permohonan Judicial Review Presidential Threshold: Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XX/2022." Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Putra, I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi, Ida Ayu Putu Widiati, and Ni Made Puspasutari Uj. “Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dalam Gugatan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Badung.” *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (October 2020): 305–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2565.305-309>.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.003/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXIII/2025.

Putusan MK Perkara Permohonan Pengujian Formil Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Terhadap UUD 1945., Pub. L. No. Nomor 27/PUU-VII/2009, Nomor 27/PUU-VII/2009 (2010).

Putusan Nomor 19/PUU-XX/2022.

Rishan, Idul. “Konsep Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 1 (May 2021): 001–021. <https://doi.org/10.31078/jk1811>.

Riskiyono, Joko. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untukmewujudkan Kesejahteraan.” *Aspirasi* 6, no. 2 (2015): 159–76. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i2.511>.

S., Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan 2: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta.Kanisius, 2007. Yogyakarta.

Safa’at, M. Ali, Agus Riewanto, Pan M. Faiz Kusuma W, Abdul Ghoffar, Andriani W Novitasari, Sunny Ummul Firdaus, Bayu Dwi Anggono, Bisariyadi, Helmi Kasim, and Luthfi Widagdo Eddyono. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.

Santoso, Hernando, Sabrina Maharani Syahpandang, and Divia Nur Alan Nur. *Konsep Constitutional Injury Sebagai Syarat Pengajuan Permohonan Pengujian Undang- Undang Terhadap Undang - Undang Dasar*. n.d. <https://doi.org/10.33005/vsj.v5i1.182>.

Saputri, Tiara Ika. “Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023.” Undergraduate_thesis, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Setyawan, Wahyu Adji. “Analisis Legal Standing Dalam Kasus Permohonan Judicial Review Mahkamah Konstitusi Terhadap Rangkap Jabatan Wakil Menteri.” Undergraduate, IAIN SALATIGA, 2021.

- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar grafika, 2011.
- Sofyan, Alfin. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Pembatalan Bersyarat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Sumadi, Ahmad Fadlil, Ahmad Subiyanto Subiyanto, and Anna Triningsih. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengembangan Dalam Praktik*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi hukum tata negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*. Edisi pertama. Edited by Nunuk Nuswardani. Tapos, Cimanggis, Depok, Indonesia: Kencana, 2017.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
- Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen, UUD 1945 (1945). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Wicaksono, Dian Agung, and Enny Nurbaningsih. “Ratio Legis Penetapan Pembayar Pajak (Taxpayer) sebagai Kedudukan Hukum dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 17, no. 3 (November 2020): 461–94. <https://doi.org/10.31078/jk1731>.
- Yuni, Ni Putu Ayu Indira, and Putu Ery Setiawan. “Pengaruh Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi.” *E-Jurnal Akuntansi* 29, no. 1 (October 2019): 128–44. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v29.i01.p09>.
- zuhaili, wahbah az-. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 8. Gema Insani, 2010.